



## Persoalan Besar di Balik Polemik PB Djarum dan KPAI

*Jakarta, 13 September 2019* – Sehari sebelumnya, telah terjadi kesepakatan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), PB Djarum, dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dengan mediator Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai laporan KPAI tentang dugaan eksploitasi anak serta penggunaan logo produk Djarum di atribut audisi bulu tangkis yang diadakan PB Djarum. Kesepakatan ini disebut-sebut menyelesaikan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pro maupun kontra dengan laporan KPAI. Namun, apakah kesepakatan ini telah benar-benar menyelesaikan hal yang mendasar dalam permasalahan ini?

Komnas Pengendalian Tembakau mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPAI yang telah mengangkat kasus ini ke muka publik sehingga masalah pengendalian tembakau yang selama ini dilihat sebelah mata menjadi perhatian nasional. Fakta bahwa industri rokok di Indonesia masih sangat longgar melakukan promosi adalah persoalan yang tak pernah terselesaikan, bahkan bisa dibilang tidak dianggap penting oleh masyarakat dan terutama pemerintah, sehingga tidak heran polemik ini justru memunculkan pembelaan-pembelaan yang tidak seimbang terhadap industri yang notabene sebenarnya menjadi beban bagi negara.

Karena itu, Komnas Pengendalian Tembakau mengajak setiap pihak untuk kembali pada persoalan mendasar dari polemik yang tampak sudah selesai ini. Sebab, persoalan Djarum vs KPAI ini hanya bagian kecil dari masalah besar pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Pembangunan SDM adalah hal yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Atas nama pembangunan SDM, tidak boleh ada hal sekecil apapun yang menghambat, apalagi hanya oleh persoalan kecil mengenai iklan/promosi terselubung industri barang kena cukai. **Pembangunan SDM tidak layak disandingkan dengan 'pengenalan' sebuah produk adiktif**, seperti yang muncul dalam kasus ini, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah. Karenanya, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih menyeluruh untuk pengendalian produk tembakau rokok dan bukannya memerintahkan seorang pejabat negara untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan pembelaan terhadap industrinya.

Ada persoalan yang lebih besar, sebenarnya, dari persoalan PB Djarum dan KPAI. Menyoroti hal ini, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, dr. Prijo Sidipratomo, menjelaskan, "Kalau pemimpin lembaga penting negara yang dipilih adalah oknum yang melanggar etik, kalau figur yang bermasalah bisa menjadi Menteri Kesehatan, dan audisi berlabel rokok direstui istana, ini adalah bukti etika memang tidak menjadi pertimbangan di negeri ini.

Ditambah dengan mereka yang dekat dengan "penguasa" tidak memanfaatkan kedekatan tersebut untuk membangun etika, maka SDM dijadikan taruhan dan kita bukan sedang menanti bonus demografi, melainkan bencana demografi."

Namun bagaimana pun, Komnas Pengendalian Tembakau setuju bahwa persoalan ini menjadi preseden bagi kita semua bahwa kita sudah semakin awas pada kondisi yang ada. Pengendalian konsumsi rokok bukan hanya masalah edukasi atau "yang penting tidak mengajak anak merokok", tapi **bagaimana regulasi dapat mengatur dan memastikannya ditaati oleh industri yang diaturnya demi perlindungan anak-anak Indonesia.**

Seperti yang disampaikan Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Komnas Pengendalian Tembakau, dr. Widyastuti Soerojo, "PB Djarum telah menunjukkan kepatuhannya pada regulasi yang berlaku dengan tidak mengiklankan dan mempromosikan produknya sambil tetap meneruskan baktinya pada negeri. CSR adalah tanggung jawab industri untuk mengatasi dampak negatif yang diakibatkannya, bukan donasi sebagai pencitraan untuk menutupi dampak negatif. **Semoga marwah kesepakatan ini menjadi landasan setiap industri barang kena cukai demi bakti negeri ke depannya.**"

\* \* \*

Keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Komnas Pengendalian Tembakau (021) 3917354 / [sekretariat@komnaspt.or.id](mailto:sekretariat@komnaspt.or.id)

**Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):**

*Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi masyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi masyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi masyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.*